



Integrated Policy Strategies for Addressing Out-of-School Children (OSC) in Metro City

Strategi Kebijakan Terintegrasi dalam Penanganan Anak tidak Sekolah (ATS) di Kota Metro

Yuli Yanto

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Metro

Author Correspondence Email: yuliyanto8812@gmail.com

Article History	Received (January 3 rd , 2026)	Revised (February 5 th , 2026)	Accepted (March 9 th , 2026)
-----------------	--	--	--

News Article

Keyword:

Out-of-School
Children;
Integrated
Policy;
Poverty.

Abstract

Education is a fundamental right; however, Metro City faces an anomaly where 526 children remain out of school (ATS) despite achieving a "Very High" Human Development Index (HDI). This study aims to identify the root causes of Out-of-School Children (OSC) and formulate integrated management strategies. The methodology employs a qualitative approach, utilizing the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method for priority analysis and a Fishbone Diagram for root cause identification. The findings indicate that family economic status is the primary determinant, where poverty remains the driving force behind children leaving school in Metro City. Other contributing factors include early marriage, limited accessibility for people with disabilities, and an uncondusive school climate resulting from bullying. The discussion emphasizes the necessity of implementing policies based on human capital theory and social ecology to foster an inclusive educational environment. The study concludes that addressing OSC in Metro City requires simultaneous rather than fragmented policies. The proposed recommendation is the enactment of a Metro Mayoral Regulation on the Regional Action Plan for Handling Out-of-School Children (RADPATS). The regulatory substance should focus on: Strengthening social protection through the validation of the National Socio-Economic Single Data (DTSEN) to ensure targeted distribution of aid, such as the Kartu Metro Bahagia; Enhancing educator competence to establish Child-Friendly Schools (SRA); and Integrating OSC management programs into regional planning documents (RPJMD/RKPD) by involving a pentahelix of stakeholders.

Kata Kunci:

Anak Tidak
Sekolah;
Kebijakan
Terintegrasi;
Kemiskinan.

Abstrak

Pendidikan merupakan hak fundamental, namun Kota Metro menghadapi anomali berupa adanya 526 Anak Tidak Sekolah (ATS) di tengah pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kategori "Sangat Tinggi". Kajian ini bertujuan mengidentifikasi akar penyebab ATS dan merumuskan strategi penanganan yang terintegrasi. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis prioritas masalah menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) serta analisis akar masalah melalui diagram *fishbone*. Hasil kajian

menunjukkan bahwa keadaan ekonomi keluarga merupakan determinan utama, di mana kemiskinan yang memaksa anak tidak sekolah di Kota Metro. Faktor lain meliputi pernikahan dini, keterbatasan akses disabilitas, dan iklim sekolah yang kurang kondusif akibat perundungan. Pembahasan menekankan perlunya implementasi kebijakan berbasis teori modal manusia dan ekologi sistem untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Kesimpulan menegaskan bahwa penanganan ATS di Kota Metro memerlukan kebijakan yang simultan dan tidak parsial. Rekomendasi yang diusulkan adalah Penerbitan Peraturan Walikota Metro tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RADPATS) di Kota Metro dengan subtransi regulasi berupa penguatan perlindungan sosial melalui validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan seperti Kartu Metro Bahagia tepat sasaran, peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA), serta integrasi program penanganan ATS ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*pentahelix*).

To cite this article: Yuli Yanto (2026). "Integrated Policy Strategies for Addressing Out-of-School Children (OSC) in Metro City". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4 (3), January-April, 2026. Page: 2179 – 2212.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa dan instrumen paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan sistemik. Secara universal, pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (United Nations, 1989) yang mewajibkan negara untuk menjamin akses pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan adalah instrumen utama dalam meningkatkan martabat dan kualitas hidup masyarakat. Sebagai investasi sosial jangka panjang, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menjadi mesin penggerak transformasi ekonomi yang mampu memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Di tengah visi besar Indonesia Emas 2045, setiap daerah dituntut untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan, karena kualitas sumber daya manusia hari ini adalah penentu daya saing daerah di masa depan. Hendra Wijaya menekankan bahwa rendahnya capaian rata-rata pendidikan penduduk dan harapan lama sekolah berbanding lurus dengan rendahnya kualitas pembangunan suatu daerah (Wijaya, 2018). Dalam konteks pembangunan ekonomi, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi modal manusia (*human capital investment*). Investasi pada pendidikan akan meningkatkan kapasitas produktivitas individu yang pada gilirannya akan mengakomodasi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kota Metro secara historis telah memposisikan diri sebagai "Kota Pendidikan" di Provinsi Lampung, sebuah identitas yang didukung oleh keberadaan 15 perguruan tinggi dan berbagai fasilitas pendidikan yang mapan dari semua jenjang pendidikan yakni Sekolah Negeri maupun Swasta sebanyak 74 sekolah jenjang TK/RA, 74 sekolah jenjang SD/MI, 40 sekolah jenjang SMP/MTs, dan 27 sekolah jenjang SMA/SMK (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025). Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam

RPJMD Kota Metro 2025-2029 "Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa Yang Religius" menjadi komitmen politik dan administratif untuk menempatkan pendidikan sebagai lokomotif utama pembangunan. Visi ini dijabarkan melalui misi strategis, di antaranya membangun Sumber Daya Manusia yang unggul, adaptif dan berkarakter. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan SDM unggul sebagai prioritas utama guna memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat dinikmati oleh setiap warga negara tanpa terkecuali.

Isu strategis yang muncul saat ini di Kota Metro adalah adanya anomali antara angka statistik makro dengan realitas sosial di lapangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS Kota Metro, 2025), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro pada tahun 2025 mencapai angka 81,22, yang menempatkannya pada peringkat kedua tertinggi di Provinsi Lampung dengan kategori "Sangat Tinggi". Namun, pencapaian ini dikontraskan dengan fakta mengejutkan yang diungkapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan terdapat 526 anak usia 7-18 tahun di Kota Metro yang masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan persebaran usia yang paling kritis berada pada kelompok usia di atas 15 tahun (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Kondisi ini semakin ironis mengingat meskipun Kota Metro memiliki fasilitas pendidikan dan perguruan tinggi yang tinggi yang baik, warga yang mampu menuntaskan pendidikan hingga jenjang Strata Satu (S1) hanya sekitar 13,05 persen, sementara lulusan S2 dan S3 tidak sampai 1 persen dari total populasi Kota Metro dengan jumlah penduduk 183.746. (BPS Kota Metro, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan tinggi masih menjadi hak istimewa bagi sebagian kecil warga, sementara fondasi pendidikan dasar dan menengah masih dibayangi oleh risiko putus sekolah.

Kemiskinan bertindak sebagai kekuatan penarik yang menyeret anak keluar dari sistem sekolah formal untuk membantu stabilitas ekonomi rumah tangga. Mulyadi (2003) menjelaskan bahwa dalam perspektif pembangunan, tekanan ekonomi memaksa keluarga melakukan kompromi terhadap masa depan anak demi keberlangsungan hidup jangka pendek. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali terjebak dalam dilema antara *opportunity cost* (biaya kesempatan) untuk bekerja dan biaya operasional pendidikan yang meskipun sekolah sudah digratiskan, namun beban biaya personal seperti transportasi, seragam, dan alat tulis tetap tidak terjangkau.

Selain hambatan ekonomi, faktor sosial seperti pernikahan usia dini menjadi pemicu utama putusnya sekolah bagi remaja di Kota Metro. Pernikahan dini sering kali berkorelasi dengan kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan jangka panjang, yang pada akhirnya memicu *drop out* prematur. Di sisi lain, kondisi psikososial di sekolah juga memegang peranan penting. Adanya praktik perundungan (*bullying*) menciptakan iklim sekolah yang tidak kondusif, menyebabkan anak kehilangan rasa aman dan motivasi belajar. Proses belajar yang optimal hanya dapat terjadi jika anak berada dalam lingkungan yang mendukung stabilitas emosionalnya. Ketidakmampuan institusi pendidikan dalam menangani isu perundungan secara efektif secara langsung berkontribusi pada peningkatan angka anak yang enggan melanjutkan sekolah.

Penyelesaian masalah ATS di Kota Metro memerlukan reorientasi pada filosofi pendidikan yang humanis. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan bertugas "menuntun" kodrat alam anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2013). Pandangan ini sejalan dengan teori sosiologi masa kanak-kanak dari James dan Prout (1997) yang melihat anak sebagai aktor sosial yang unik, bukan sekadar "orang dewasa mini". Oleh karena itu, kebijakan

penanganan ATS tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh kebutuhan spesifik anak, termasuk peningkatan aksesibilitas bagi anak dengan disabilitas yang sering kali terabaikan dalam sistem pendidikan arus utama. Ketimpangan akses ini jelas bertentangan dengan mandat undang-undang perlindungan anak yang secara eksplisit menjamin hak pendidikan sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun.

Mengingat kompleksitas masalah yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan infrastruktur, penanganan ATS di Kota Metro memerlukan sebuah Strategi Kebijakan Terintegrasi. Pendekatan parsial yang selama ini dilakukan oleh masing-masing dinas terbukti belum mampu menuntaskan anomali angka ATS di tengah tingginya IPM. Oleh karena itu, studi kualitatif ini sangat penting dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam tantangan implementasi kebijakan dalam konteks institusional di Kota Metro. Melalui integrasi data, kajian ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat demi mewujudkan visi Kota Metro sebagai kota pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Identifikasi Masalah

Permasalahan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro bersifat multidimensional dan saling berkaitan dalam satu ekosistem sosial yang kompleks. Secara spesifik, empat masalah utama yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Keadaan Ekonomi Keluarga yang miskin menjadikan Anak Tidak Sekolah. Faktor ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi hambatan struktural utama yang memaksa anak melepaskan hak pendidikannya demi membantu memenuhi kebutuhan hidup harian keluarga. Kemiskinan menciptakan "biaya peluang" (*opportunity cost*). Anak tidak hanya terhambat biaya sekolah, tapi juga "dipaksa" menjadi unit produksi ekonomi keluarga. Dijelaskan teori *Social Reproduction*, bahwa kemiskinan orang tua cenderung diturunkan ke anak karena keterbatasan modal ekonomi dan budaya (Kurt, 2015). Merujuk pada *Laporan Indeks Kedalaman Kemiskinan*, terdapat korelasi kuat antara kuintil pengeluaran terendah dengan tingginya Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang SMA/SMK karena kebutuhan masuk ke pasar kerja informal lebih awal (BPS Kota Metro, 2025).
2. Pernikahan Dini dan Kehamilan Remaja menjadikan anak *Drop Out* dari Sekolah. Pernikahan dini dan kehamilan remaja turut berkontribusi secara signifikan terhadap angka putus sekolah, di mana kebijakan sekolah formal seringkali kurang memberikan ruang bagi anak dengan kondisi khusus tersebut. Pernikahan dini adalah penyebab sistemik *Drop Out* (DO), terutama bagi remaja perempuan, karena adanya stigma sosial dan keterbatasan peran ganda (pelajar sekaligus orang tua). Jurnal Endokrinologi, menjelaskan bahwa pernikahan dini seringkali dianggap solusi ekonomi oleh keluarga miskin, namun justru menghentikan masa depan pendidikan anak (Pohan, 2017). Data *Profil Anak Indonesia* mencatat bahwa perkawinan anak menyumbang angka putus sekolah yang signifikan, di mana 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun (Kementerian PPPA, 2024).
3. Iklim sekolah yang tidak kondusif membuat anak merasa tidak aman secara psikis sehingga memilih untuk berhenti (*drop out*). Hasil *Asesmen Nasional (AN)* pada variabel Iklim Keamanan Sekolah menunjukkan tingkat kerentanan perundungan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan yang berbanding lurus dengan angka ketidakhadiran siswa (Kemendikdasmen, 2025). Tekanan psikis akibat praktik

perundungan (*bullying*) membuat anak merasa tidak aman untuk bertahan dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang penuh dengan perundungan (*bullying*) atau tekanan mental membuat sekolah menjadi tempat yang traumatis, bukan tempat belajar. Iklim sekolah yang tidak aman secara emosional memicu depresi dan keputusan anak untuk berhenti sekolah (Coloroso, 2007)

4. Kurangnya Akses bagi Disabilitas untuk bersekolah. Masih rendahnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik dari sisi sarana prasarana maupun tenaga pendidik khusus, menjadikan kelompok ini paling rentan terhadap marginalisasi pendidikan di Kota Metro (Bappeda, 2025). Hambatan bagi disabilitas bukan hanya fisik (rampa/fasilitas), tetapi juga hambatan kurikulum dan kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK). Akomodasi yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus agar tidak terlempar dari sistem pendidikan formal sangatlah penting (Hallahan, & Kauffman, 2006).

Untuk menentukan masalah yang paling krusial dan memerlukan intervensi segera serta terfokus, digunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG). Metode ini memungkinkan penilaian sistematis terhadap setiap masalah berdasarkan tiga kriteria utama: *Urgency* (seberapa mendesak masalah tersebut harus ditangani), *Seriousness* (seberapa serius dampak masalah tersebut jika tidak ditangani), dan *Growth* (seberapa cepat masalah tersebut akan memburuk jika tidak ada tindakan). Setiap kriteria diberi skor numerik (1 hingga 5), dan total skor digunakan untuk menentukan prioritas. Pendekatan USG ini membantu dalam pengambilan keputusan yang terstruktur. Berdasarkan analisis USG yang dilakukan, masalah-masalah tersebut mendapatkan skor sebagaimana pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Analisis USG untuk Prioritisasi Masalah Anak Tidak Sekolah di Kota Metro

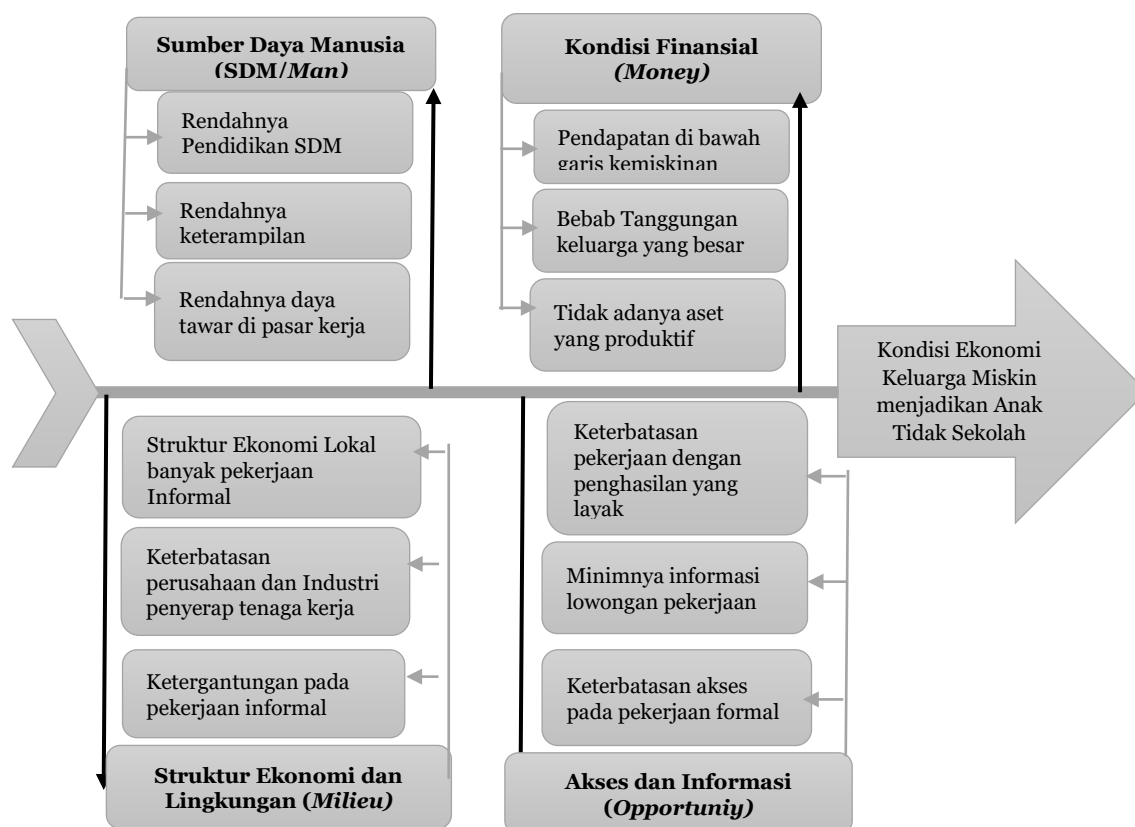
No	Identifikasi Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Score	Prioritas
1	Keadaan Ekonomi Keluarga yang miskin menjadikan Anak Tidak Sekolah	5	5	4	14	Sangat Tinggi
2	Pernikahan Dini dan Kehamilan Remaja menjadikan anak <i>Drop Out</i> dari Sekolah	4	4	4	12	Tinggi
3	Iklim sekolah yang tidak kondusif membuat anak merasa tidak aman secara psikis sehingga memilih untuk berhenti sekolah	3	3	3	9	Sedang
4	Kurangnya Akses bagi Disabilitas untuk bersekolah di Kota Metro	3	4	4	11	Tinggi

Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), ditemukan bahwa keadaan ekonomi keluarga merupakan masalah yang paling mendesak dan krusial dengan total skor tertinggi, yaitu 14. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi determinan utama yang memaksa anak-anak di Kota Metro untuk meninggalkan bangku pendidikan. Tingkat urgensi dan keseriusan masalah ini berada pada level maksimal (skala 5), mengingat beban finansial keluarga tidak hanya menghambat akses pendidikan, tetapi juga mengancam masa depan produktivitas generasi muda jika tidak segera ditangani melalui intervensi bantuan sosial atau

beasiswa tepat sasaran. Pada peringkat kedua, masalah pernikahan dini dan kehamilan remaja memperoleh skor 12, yang mengindikasikan tingkat risiko yang tinggi. Isu ini memerlukan perhatian serius karena memiliki potensi pertumbuhan masalah yang signifikan (skor 4). Jika edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perlindungan anak tidak diperkuat, tren ini akan terus menyumbang angka putus sekolah secara permanen akibat stigma sosial dan peralihan peran anak menjadi orang tua di usia dini. Selanjutnya, kurangnya akses bagi penyandang disabilitas di Kota Metro berada pada prioritas ketiga dengan skor 11. Meskipun jumlah kasusnya secara kumulatif mungkin lebih sedikit dibanding faktor ekonomi, tingkat keseriusan dan pertumbuhan masalah ini dinilai tinggi (skor 4). Hal ini mencerminkan masih adanya celah dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif yang setara, di mana keterbatasan fasilitas fisik maupun tenaga pendidik khusus dapat memperlebar jurang diskriminasi pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Terakhir, iklim sekolah yang tidak kondusif terkait rasa aman psikis siswa berada pada prioritas sedang dengan total skor 9. Walaupun menduduki peringkat terendah dalam analisis ini, masalah tekanan psikis dan perundungan tetap memberikan kontribusi terhadap keputusan anak untuk berhenti sekolah. Secara keseluruhan, narasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah anak tidak sekolah di Kota Metro harus diprioritaskan pada penguatan ekonomi dan perlindungan sosial, tanpa mengabaikan perbaikan aksesibilitas bagi kelompok rentan serta kenyamanan lingkungan belajar.

Untuk memahami lebih dalam penyebab Keadaan Ekonomi Keluarga Miskin yang menjadikan Anak Tidak Sekolah, dilakukan analisis akar masalah menggunakan Diagram *Fishbone*. Diagram ini memvisualisasikan berbagai kategori penyebab dan sub-penyebab yang berkontribusi pada masalah utama, memberikan gambaran yang terstruktur tentang kompleksitas permasalahan tersebut.



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berikut adalah analisis penyebab masalah menggunakan *Diagram Fishbone* (Tulang Ikan) untuk membedah mengapa kondisi ekonomi keluarga mengakibatkan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro. Diagram ini mengelompokkan penyebab ke dalam empat kategori utama:

1. Sumber Daya Manusia (SDM/*Man*)

Akar masalah bermula dari kualitas orang tua yang rendah. Menurut Michael Todaro dan Stephen Smith dalam buku "*Economic Development*" (Todaro & Smith, 2020) rendahnya pendidikan formal berkorelasi langsung dengan kualitas SDM. Hal ini diperparah oleh kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri (Mulyadi, 2003), sehingga orang tua memiliki daya tawar yang sangat rendah di pasar kerja (Suroto, 2000).

2. Struktur Ekonomi dan Lingkungan (*Milieu*)

Lingkungan ekonomi di Kota Metro yang didominasi oleh sektor informal (Bremam, 2022) dan minimnya industri pengolahan menciptakan ekosistem kerja yang tidak stabil (Arsyad, 2010). Kondisi ini memaksa orang tua bergantung pada pekerjaan informal yang tidak memberikan jaminan pendapatan tetap (Sasono, 1982).

3. Kondisi Finansial (*Money*)

Kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran menjadi faktor krusial. Pendapatan yang berada di bawah garis kemiskinan (Firdausy, 2020) harus berhadapan dengan beban tanggungan keluarga yang besar (BPS Kota Metro, 2025). Selain itu, tidak adanya aset produktif atau modal membuat keluarga sulit melakukan lompatan ekonomi (Mubyarto, 1995).

4. Akses dan Informasi (*Opportunity*)

Keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal (Juliansyah dkk., 2024) dan minimnya informasi lowongan pekerjaan (Purnomo, 2014) membuat orang tua terjebak dalam kemiskinan struktural. Tanpa informasi dan akses yang memadai, peluang untuk mendapatkan penghasilan layak tertutup (Hikamudin dkk., 2023).

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan prioritas masalah yang telah dilakukan, sebuah pernyataan masalah yang jelas dan komprehensif dapat dirumuskan untuk menjadi panduan utama dalam kajian ini. Pernyataan masalah ini tidak hanya menguraikan inti permasalahan, tetapi juga menyoroti akar penyebabnya serta potensi dampaknya terhadap Kota Metro. *Problem statement* yang mendasari penyusunan naskah kebijakan ini adalah: "Keadaan Ekonomi Keluarga yang miskin menjadikan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro yang disebabkan oleh beban tanggungan keluarga yang besar, sedangkan penghasilan yang kecil serta pendapatan Orang Tua dibawah Garis Kemiskinan". Tanpa intervensi kebijakan yang terintegrasi dan responsif, siklus kemiskinan struktural ini akan terus berlanjut, mengakibatkan *intergenerational poverty* atau kemiskinan antar generasi yang sulit diputus,. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi terintegrasi kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Metro.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan penyusunan kajian ini antara lain:

1. Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan berbagai dimensi yang terkait dengan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro.
2. Merumuskan dan menyajikan Alternatif Kebijakan yang tepat dalam penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro yakni kebijakan yang terintegrasi lintas sektor.
3. Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Metro serta *stakeholders* terkait dalam penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro sehingga dapat menjadi pertimbangan yang perspektif dalam proses pembuatan atau revisi kebijakan.

Manfaat kajian ini dibagi menjadi beberapa perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*):

1. Bagi Pemerintah Kota Metro
 - Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan strategis dalam pengambilan keputusan (kebijakan berbasis data) untuk menuntaskan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS).
 - Menyediakan kerangka kerja kolaboratif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas UMKM dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Kecamatan, dan Kelurahan guna menghindari tumpang tindih program.
2. Bagi Satuan Pendidikan dan Masyarakat
 - Mendorong terciptanya ekosistem sekolah yang lebih inklusif dan ramah anak, serta memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai jalur pendidikan alternatif.
 - Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dan orang tua akan pentingnya menuntaskan pendidikan minimal 12 tahun bagi masa depan anak.
3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan (Akademis)
 - Memberikan kontribusi pemikiran dalam studi kebijakan publik, khususnya mengenai model penanganan ATS di wilayah perkotaan dengan karakteristik "Kota Pendidikan".
 - Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu pendidikan inklusif dan pengentasan kemiskinan berbasis akses sekolah.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro, serta untuk merumuskan intervensi kebijakan yang efektif, kajian ini menggunakan beberapa kerangka teori dan konseptual. Kerangka ini akan berfungsi sebagai lensa analitis untuk memahami dinamika perilaku individu dan sosial, serta proses perubahan institusional.

Kerangka Teori

Kerangka teori menyediakan dasar ilmiah untuk memahami fenomena kajian, membantu menjelaskan hubungan kausal, dan memprediksi hasil dari intervensi yang diusulkan.

1. Teori modal manusia (*human capital theory*)

Teori modal manusia (*human capital theory*) oleh Gary Becker dan Theodore Schultz adalah salah satu landasan paling kuat dalam ekonomi pendidikan dan pembangunan sosial. (Becker, 1975) memperkenalkan konsep ekonomi yang menganalisis keputusan investasi individu sebagai *trade-off* antara biaya peluang (pendapatan yang dikorbankan sekarang) dan manfaat ekonomi serta psikologis di masa depan. Secara singkat, teori ini menganggap bahwa pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pelatihan bukanlah "biaya konsumsi" yang hilang, melainkan investasi yang akan menghasilkan keuntungan (*return*) di masa depan. Teori ini relevan untuk menganalisis biaya peluang (*opportunity cost*) karena Orang tua miskin seringkali menyuruh anak bekerja (menghasilkan uang sekarang) daripada sekolah. Mereka menganggap biaya peluang sekolah terlalu tinggi, padahal pendidikan merupakan investasi pada diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan diri (*skill self*) yang akan meningkatkan produktivitas pendapatan lebih tinggi di masa depan. Dalam konteks Kota Metro, orang tua dari keluarga miskin sering kali menghadapi dilema *opportunity cost* yang ekstrem. Mereka cenderung melihat sekolah sebagai biaya tinggi karena anak kehilangan potensi pendapatan saat ini, padahal secara teoritis, setiap tahun tambahan persekolahan akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan di masa depan.

2. Teori ekologi sistem (*ecological systems theory*)

Teori ekologi sistem (*ecological systems theory*). Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa perilaku anak (termasuk putus sekolah) dipengaruhi oleh lingkungan yang berlapis seperti mikrosistem, yakni lingkungan terdekat yang berinteraksi langsung dengan anak, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan rumah. Konflik keluarga, kurangnya motivasi dari orang tua, atau perundungan (*bullying*) di sekolah merupakan faktor mikrosistem utama pemicu Anak Tidak Sekolah. Mesosistem yaitu hubungan antar komponen dalam mikrosistem, misalnya koordinasi antara orang tua dan guru. Komunikasi yang buruk antara rumah dan sekolah dapat menyebabkan masalah belajar anak tidak terdeteksi sejak dini. Eksosistem yaitu lingkungan eksternal yang memengaruhi anak secara tidak langsung, seperti kebijakan tempat kerja orang tua, stabilitas ekonomi daerah, atau ketersediaan pusat komunitas pendidikan. Makrosistem yaitu budaya masyarakat yang mungkin kurang menghargai pendidikan, serta penanganan yaitu solusi tidak bisa hanya pada anak, tapi harus membenahi lingkungan keluarga dan masyarakat secara serentak.

Bronfenbrenner (1979) menegaskan bahwa jika hubungan dalam mikrosistem primer (keluarga) mengalami gangguan akibat tekanan ekonomi atau ketidakstabilan, anak akan kehilangan instrumen untuk mengeksplorasi bagian lain dari lingkungannya secara efektif. Oleh karena itu, solusi penanganan ATS di Kota Metro tidak bisa hanya bersifat satu arah (kepada anak), melainkan harus menyentuh penguatan lingkungan keluarga dan ekosistem sekolah secara serentak.

3. Teori *push and pull factors* (faktor pendorong dan penarik)

Teori *push and pull factors* (faktor pendorong dan penarik) (Dewa & Prasetyo, 2022). Teori ini sering digunakan untuk menganalisis mengapa anak keluar dari sistem sekolah. Faktor pendorong (*push*) yakni faktor internal sekolah yang membuat anak tidak nyaman, seperti kurikulum yang membosankan, kekerasan di sekolah (*bullying*), atau guru yang tidak suportif. Faktor penarik (*pull*), yakni faktor eksternal yang menarik anak keluar, seperti keinginan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau pengaruh pergaulan. Faktor pendorong internal sekolah mencakup

iklim belajar yang tidak kondusif, kurikulum yang dianggap tidak relevan, hingga kekerasan di sekolah. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa rasa tidak aman secara psikis akibat *bullying* atau metode pengajaran yang tidak mendukung keberagaman sering kali membuat anak merasa teralienasi dari sistem sekolah. Sementara itu, faktor penarik eksternal didominasi oleh godaan untuk memasuki pasar tenaga kerja informal guna membantu finansial keluarga atau pengaruh negatif dari kelompok sebaya yang tidak bersekolah. Di Kota Metro, kemiskinan keluarga bertindak sebagai faktor penarik yang paling kuat, di mana anak sering kali merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja demi kelangsungan hidup anggota keluarga lainnya. Analisis ini sangat relevan untuk mengidentifikasi mengapa anak memilih untuk keluar dari jalur pendidikan formal.

Kerangka Konseptual

Konsep dan pengertian Anak telah didefinisikan secara luas oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum, psikologi perkembangan, hingga sosiologi. Memahami definisi anak secara teoretis sangat penting dalam artikel kebijakan ini untuk menentukan batasan usia dan hak-hak yang melekat pada objek kebijakan di Kota Metro. Berikut adalah penjabaran konsep dan pengertian anak menurut referensi ahli dan literatur formal:

1. Pengertian anak berdasarkan perspektif hukum (legalitas)

Secara hukum, pengertian anak umumnya dikaitkan dengan batasan usia kronologis sebagai indikator ketidakmampuan hukum (*legal incapacity*).

- Konvensi Hak Anak (United Nations, 1989): menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut, kedewasaan dicapai lebih dini. Ini adalah referensi global utama yang diadopsi oleh Indonesia.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- H. Abu Huraerah (2006) menekankan bahwa secara hukum anak dipandang sebagai individu yang belum mandiri dan masih membutuhkan perlindungan serta pengawasan orang dewasa.

2. Pengertian anak berdasarkan perspektif psikologi perkembangan

Para ahli psikologi lebih menitikberatkan pada fase pertumbuhan mental, kognitif, dan emosional.

- Jean Piaget and Inhelder (1969) melihat anak sebagai sosok yang sedang berada dalam tahapan perkembangan kognitif (dari sensorimotor hingga formal operasional). Dalam pandangan Piaget, anak bukan "orang dewasa mini", melainkan individu yang cara berpikirnya berbeda secara kualitatif dari orang dewasa.
- Elizabeth Hurlock (1980) membagi masa anak-anak menjadi beberapa fase (masa bayi, masa kanak-kanak awal, dan akhir). Ia mendefinisikan anak sebagai individu yang sedang dalam proses "menjadi" (*becoming*), di mana setiap fase memiliki tugas perkembangan unik yang harus dipenuhi.

3. Pengertian anak berdasarkan perspektif *sociocultural* (sosiologi)

James dan Prout (1997) melalui teori *constructing and reconstructing childhood*, mereka berargumen bahwa "anak" adalah sebuah konstruksi sosial. Artinya, pengertian anak bisa berbeda antar budaya. Namun, secara universal, anak dianggap sebagai anggota masyarakat yang memiliki posisi unik dalam struktur sosial yang memerlukan pendampingan khusus melalui institusi seperti keluarga dan sekolah.

4. Pengertian anak berdasarkan sudut pandang pedagogi

Ki Hajar Dewantara (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2013): Tokoh pendidikan Indonesia ini memandang anak sebagai "kodrat alam". Anak adalah individu yang memiliki potensi unik (bakat) yang harus dituntun pertumbuhannya. Pendidikan bertugas untuk "menuntun" kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah setiap individu manusia yang belum mencapai usia 18 tahun (termasuk yang masih dalam kandungan) yang secara hukum dipandang belum memiliki kemandirian penuh (*legal incapacity*), sehingga hak-hak dasarnya wajib dijamin dan dilindungi oleh orang dewasa, keluarga, dan negara. Penjabaran konseptual mengenai Anak Tidak Sekolah (ATS) melibatkan pemahaman yang komprehensif karena fenomena ini bukan sekadar angka statistik, melainkan refleksi dari hambatan sistemik dalam pembangunan manusia.

1. Definisi operasional ATS

Secara konseptual, Anak Tidak Sekolah (ATS) merujuk pada individu dalam usia sekolah wajib belajar (biasanya 7–18 tahun) yang tidak berada dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal. ATS dibagi menjadi tiga kategori utama:

- Anak *drop out* (putus sekolah): Anak yang pernah bersekolah namun berhenti sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
- Anak tidak pernah sekolah: Anak yang sama sekali belum pernah mengenyam bangku pendidikan sejak usia dini.
- Anak Lulus Tidak Lanjut (LTL): Anak yang menyelesaikan satu jenjang pendidikan (misalnya SD), namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (SMP).

2. Tipologi penyebab (multidimensional)

Konsep ATS harus dipahami melalui lensa multidimensi. Masalah ini jarang sekali disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akumulasi dari:

- Hambatan ekonomi (*supply and demand*): Ketidakmampuan keluarga membiayai pengeluaran pendidikan (biaya langsung) atau kebutuhan akan tenaga kerja anak untuk menambah pendapatan keluarga (*opportunity cost*).
- Hambatan sosial-budaya: Adanya persepsi rendah terhadap nilai pendidikan, praktik pernikahan dini, atau stigmatisasi terhadap anak-anak tertentu (misalnya penyandang disabilitas).
- Hambatan institusional: Lokasi sekolah yang jauh, kurangnya fasilitas inklusi, hingga iklim sekolah yang tidak aman (adanya perundungan).

3. Kerangka siklus eksklusi pendidikan

Dalam teori kebijakan publik, ATS dipandang sebagai bentuk eksklusi sosial. Konsep ini menjelaskan bahwa ketika seorang anak berhenti sekolah, ia kehilangan

modal manusia (*human capital*), yang di masa depan akan membatasi aksesnya ke pasar tenaga kerja formal. Hal ini menciptakan "Siklus Kemiskinan Antargenerasi", di mana kemiskinan orang tua menyebabkan anak putus sekolah, dan anak tersebut kelak akan menjadi orang tua yang miskin pula.

4. Konsep pendidikan inklusif dan berkelanjutan

Secara konseptual, solusi untuk ATS bukan hanya "memasukkan anak ke sekolah", melainkan memastikan Pendidikan Inklusif. Artinya, sistem pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kondisi anak (misalnya anak yang harus bekerja bisa mengikuti jalur non-formal seperti PKBM), bukan sebaliknya. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus tetap terpenuhi meskipun kondisi sosial-ekonomi anak berada dalam posisi rentan.

5. ATS dalam indikator pembangunan

Dalam kerangka kerja global (seperti *SDGs*) maupun nasional (seperti RPJMN), angka ATS merupakan indikator kunci keberhasilan pembangunan. Penurunan angka ATS secara konseptual berkorelasi langsung dengan:

- Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Penurunan angka pengangguran dan kriminalitas remaja di masa depan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah setiap individu dalam rentang usia wajib belajar (7–18 tahun) yang tidak terdaftar atau tidak mengikuti kegiatan belajar di jalur pendidikan formal maupun non-formal. Kondisi ini mencakup anak yang sama sekali belum pernah mengenyam bangku sekolah, anak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan satu jenjang pendidikan, serta anak yang lulus dari suatu jenjang namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

METODOLOGI

Penyusunan naskah kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif dan telaah dokumen untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang strategis dan aplikatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, seperti pola perilaku dan tantangan implementasi kebijakan dalam konteks institusional spesifik (Creswell & Creswell, 2018). Hal ini memungkinkan pemahaman yang kaya tentang "mengapa" dan "bagaimana" masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) muncul di Kota Metro.

Proses dimulai dengan identifikasi isu luas, yaitu "Adanya Anak Tidak Sekolah di Kota Metro". Ini menjadi titik tolak untuk menggali permasalahan yang lebih spesifik. Selanjutnya, beberapa masalah spesifik yang berkontribusi terhadap isu utama tersebut dijabarkan, dengan mengacu pada laporan internal dan observasi terkait upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro. Untuk menentukan masalah utama yang menjadi fokus intervensi, digunakan metode skoring *Urgency*, *Seriousness*, *Growth* (USG). Metode ini melibatkan penilaian sistematis terhadap setiap masalah berdasarkan tingkat kegawatan, keseriusan dampak, dan potensi pertumbuhan masalah jika tidak ditangani. USG membantu memfokuskan perhatian pada aspek-aspek paling kritis dari masalah, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan untuk area yang paling membutuhkan.

Setelah masalah utama ditetapkan, dilakukan analisis akar masalah secara berjenjang

menggunakan Diagram *Fishbone* (*Ishikawa*) (Sulianta, 2024) Diagram ini memvisualisasikan berbagai potensi penyebab yang berkontribusi terhadap masalah utama, mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori utama (misalnya, Manusia, Money, Kebijakan) untuk mengidentifikasi penyebab fundamental daripada hanya gejala. Pendekatan metodologis yang sistematis ini, dari USG hingga *Fishbone*, tidak hanya merupakan langkah prosedural, tetapi juga alat analitis yang penting. USG memaksa prioritas berdasarkan dampak dan urgensi, sementara Diagram *Fishbone* memastikan eksplorasi kausalitas yang komprehensif dan terstruktur, mencegah solusi yang dangkal. Pendekatan yang ketat ini meningkatkan kredibilitas dan ketangguhan rekomendasi kebijakan, memastikan bahwa rekomendasi tersebut menargetkan akar masalah yang sebenarnya.

Pengumpulan data dalam kajian ini sepenuhnya mengandalkan studi dokumen dan telaah pustaka yang ekstensif. Berbagai sumber sekunder dianalisis, meliputi:

1. Artikel-artikel akademik dan publikasi ilmiah yang membahas Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah.
2. Dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan terkait pendidikan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) (misalnya, UU Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Fakir Miskin, dst), dan kebijakan institusional Pemerintah Kota Metro (misalnya, Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah).
3. Data-data lintas sektoral (BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dst).

Ketergantungan pada data sekunder, meskipun ekstensif, berarti kajian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui survei lapangan mendalam, wawancara langsung dengan anak tidak sekolah, atau observasi secara langsung. Hal ini merupakan batasan metodologis yang berarti temuan dan rekomendasi didasarkan pada bukti terdokumentasi dan deduksi logis, tanpa validasi empiris langsung dari persepsi. Kajian di masa depan dapat melengkapi temuan ini dengan pengumpulan data primer untuk memvalidasi asumsi tentang pendorong perilaku dan tantangan implementasi dari perspektif audiens target.

Berdasarkan analisis akar masalah dan kerangka teoritis yang telah dibahas, beberapa alternatif kebijakan strategis dirumuskan. Alternatif-alternatif ini dirancang secara khusus untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dalam konteks Anak Tidak Sekolah di Kota Metro. Untuk memilih alternatif kebijakan yang paling direkomendasikan, digunakan metode skoring dengan kriteria evaluasi kebijakan yang diadaptasi dari kerangka William N. Dunn (Dunn, 1999) Kriteria yang digunakan meliputi Efektivitas, Efisiensi, Ekuitas, dan Responsivitas. Penilaian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa pilihan kebijakan didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap potensi dampaknya.

Tahap akhir dari metodologi ini adalah perumusan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur. Rekomendasi ini didasarkan pada alternatif kebijakan yang terpilih sebagai yang paling optimal, dan akan merinci langkah-langkah implementatif bagi Pemerintah Kota Metro dalam penanganan Anak Tidak Sekolah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan utama dalam penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro serta akar penyebab yang mendasarinya.

Prioritisasi Masalah

Berdasarkan aplikasi metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) terhadap empat masalah yang teridentifikasi, ditemukan bahwa "Keadaan Ekonomi Keluarga yang miskin menjadikan Anak Tidak Sekolah" merupakan masalah prioritas utama. Masalah ini memperoleh total skor tertinggi, yaitu 14, mengungguli masalah lain seperti Pernikahan Dini dan Kehamilan Remaja menjadikan anak *Drop Out* dari Sekolah (skor 12) atau Kurangnya Akses bagi Disabilitas untuk bersekolah di Kota Metro (skor 11) dan atau Iklim sekolah yang tidak kondusif membuat anak merasa tidak aman secara psikis sehingga memilih untuk berhenti (*drop out*) (skor 9). Hal ini mengonfirmasi bahwa keterbatasan finansial menjadi penghambat utama bagi anak-anak di Kota Metro untuk mengakses pendidikan yang layak, di mana tekanan ekonomi sering kali memaksa mereka memasuki dunia kerja prematur. Masalah ini memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena berdampak langsung pada masa depan generasi muda, serta memiliki tren pertumbuhan yang mengkhawatirkan jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Analisis Akar Masalah

Untuk memahami lebih dalam penyebab keadaan ekonomi keluarga yang miskin menjadikan Anak Tidak Sekolah, dilakukan analisis akar masalah menggunakan Diagram *Fishbone*. Diagram ini memvisualisasikan berbagai kategori penyebab dan sub penyebab yang berkontribusi pada masalah utama, memberikan gambaran yang terstruktur tentang kompleksitas isu tersebut. Akar penyebab dari fenomena ini berhasil dipetakan, yang mengungkap bahwa rendahnya pendidikan orang tua menjadikan daya tawar orang tua di pasar kerja akibat keterbatasan keterampilan menjadi pemicu utama kemiskinan sistemik. Di sisi lain, faktor lingkungan seperti normalisasi pernikahan dini dan iklim sekolah yang kurang ramah secara psikis turut memperlebar celah bagi terjadinya kasus putus sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Metro tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari akumulasi berbagai variabel mulai dari aspek kebijakan, sosial, hingga infrastruktur pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok disabilitas. Diagram *fishbone* secara jelas menunjukkan bahwa penyebab Keadaan Ekonomi Keluarga yang miskin menjadikan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro bukan hanya kegagalan individu, melainkan gejala dari masalah sistemik dan struktural yang lebih dalam yang dihadapi oleh Kota Metro. Ini bukan hanya tentang individu yang bersekolah atau putus sekolah saja, tetapi juga tentang lingkungan institusional (kebijakan, kurikulum, ruang fisik, kepemimpinan, dan budaya) yang tidak secara memadai mendukung atau mendorong warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, strategi intervensi yang efektif harus bersifat integratif dan komprehensif, menangani permasalahan pendidikan di Kota Metro. Fokus tunggal pada satu aspek kemungkinan besar tidak akan cukup untuk mencapai transformasi yang diinginkan.

Komitmen dan Capaian Pemerintah Kota Metro dalam Sektor Pendidikan

1. Visi dan misi Kota Metro 2025-2029

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro 2025-2029, maka visi Kota Metro adalah Metro Kota Metro Cerdas Berbasis Jasa yang Religius yang dijabarkan dalam 5 Misi, yakni: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter. 2) Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima. 3). Membangun Ekonomi dan Sosial yang inklusif

serta berdaya saing, 4). Membangun Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. 5). Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata. Melalui visi dan misi ini, maka jelas bahwa komitmen Kota Metro dalam menjadikan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul menunjukkan bahwa fokus pembangunan Kota Metro yakni pada peningkatan standar kualitas pendidikan (literasi, numerasi, dan kompetensi global) agar lulusan Metro mampu bersaing di tingkat nasional, serta adaptif yakni kurikulum dan metode pengajaran di Metro akan diarahkan pada penguasaan teknologi digital dan keterampilan masa depan (AI, coding, atau kewirausahaan kreatif) dan yang tak kalah pentingnya yakni berkarakter yakni mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pendidikan formal, memastikan bahwa kecerdasan intelektual dibarengi dengan etika.

2. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro

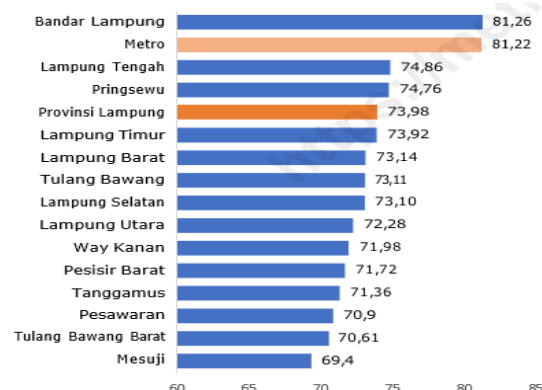
Kota Metro merupakan salah satu Kota, di Kota Metro dengan capaian IPM yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan IPM Kota Metro, 2024-2025

No	Komponen IPM	2024	2025
1	Umur Harapan Hidup	75,43	75,86
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,79	14,97
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,01	11,19
4	Rata-rata Pengeluaran per Kapita disesuaikan Setahun (Rp 000)	13.092	13.380
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,41	81,22

Sumber: BPS Kota Metro, 2025

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa indikator indeks pembangunan manusia Kota Metro dalam periode 2024–2025 menunjukkan peningkatan di seluruh komponen. Umur Harapan Hidup naik dari 75,43 tahun menjadi 75,86 tahun, mencerminkan perbaikan aspek kesehatan, layanan kesehatan preventif, dan peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Komponen pendidikan juga mengalami perkembangan positif, terlihat dari peningkatan Harapan Lama Sekolah dari 14,79 menjadi 14,97 tahun serta Rata-rata Lama Sekolah dari 11,01 menjadi 11,19 tahun. Hal ini menandakan bahwa anak-anak di Kota Metro memiliki prospek belajar lebih lama, sementara penduduk dewasa juga menunjukkan capaian pendidikan yang semakin tinggi.



Gambar 2. Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2025

Sumber: BPS Kota Metro, 2025.

Gambar 2 di atas memperlihatkan perbandingan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2025, dengan Kota Metro berada pada kelompok nilai tinggi

namun belum mencapai posisi teratas. Nilai IPM antar wilayah terlihat bervariasi, menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan manusia di provinsi ini. Meskipun sebagian besar daerah telah berada dalam kategori cukup baik, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di wilayah dengan nilai lebih rendah tetap menjadi prioritas untuk pemerataan pembangunan.

3. Profil Pendidikan Kota Metro

Pembangunan sektor pendidikan di Kota Metro menunjukkan capaian yang cukup positif. Hal ini tercermin dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis yang diarahkan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan pada seluruh jenjang. Pemerintah Kota Metro terus berupaya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing, dengan dukungan infrastruktur, pendidik, serta kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Data Satuan Pendidikan di Kota Metro sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Data Satuan Pendidikan di Kota Metro Tahun 2025

No	Kecamatan	Satuan Pendidikan		Jumlah Satuan Pendidikan
		Negeri	Swasta	
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	4	59	63
2	Rahdatul Anfal (RA)	-	11	11
3	Sekolah Dasar (SD)	47	18	65
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	3	6	9
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	10	20	30
6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	10	10
7	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7	15	22
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	4	15	19
9	Madrasah Aliyah	1	7	8
Total		76	161	237

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2025

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat bahwa Kota Metro dengan luas wilayah 73,214 km² (RPJMD Kota Metro 2025-2029) terdapat Satuan Pendidikan dari jenjang TK/Sederajat s.d. Jenjang SMA/SMK sederajat berjumlah 237 Satuan Pendidikan yang terdiri dari 76 Satuan Pendidikan Negeri dan 161 Satuan Pendidikan Swasta. Tentunya jumlah tersebut sudah cukup untuk melayani pendidikan Anak Usia 5-18 tahun di Kota Metro. Adapun Jumlah Siswa yang bersekolah di satuan -satuan pendidikan Kota Metro sebagaimana tabel 4 berikut:

Tabel 4. Data Siswa di Satuan Pendidikan se-Kota Metro Tahun 2025.

Kecamatan	TK	KB	TPA	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
Metro Utara	756	250	0	3.367	2.812	1.579	361	0	9.125
Metro Pusat	2.162	499	30	7.797	3.113	1.307	158	103	15.169
Metro Timur	1.166	286	58	3.887	2.835	4.343	3.606	0	16.181
Metro Selatan	387	181	23	1.843	1.117	1.643	812	141	6.147
Metro Barat	897	223	26	3.491	4.628	3.170	4.610	81	17.126

Sumber: Portal Data Pendidikan, Kemendikdasmen, 2026

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah siswa yang bersekolah di Kota Metro sebanyak 17.126 orang yang tersebar di 22 Kelurahan dan 5 Kecamatan di Kota Metro dengan jumlah penduduk 183.712 jiwa. Artinya terdapat 9,29 % penduduk Kota Metro yang bersekolah di sektor formal di Kota Metro. Tak hanya satuan pendidikan formal, tetapi Kota Metro juga terdapat Satuan Pendidikan Kesetaraan di Kota Metro.

Tabel 5. Data Siswa di Satuan Pendidikan Non Formal se-Kota Metro Tahun 2025

No	Uraian	Kecamatan	Siswa Pendidikan Kesetaraan			
			PAKET A	PAKET B	PAKET C	Jumlah
1.	PKBM Rona	Metro Pusat	9	24	55	88
2	PKBM Imam Asy-Syafi'i	Metro Pusat	24	31	147	202
3	SKB Kota Metro	Metro Barat	52	156	172	380
4	PKBM Nusantara	Metro Barat	82	82	82	246
5	PKBM Lestari	Metro Utara	80	405	32	517
6	PKBM Matlaun Nur	Metro Utara	180	68	142	390
7	PKBM Sakura	Metro Utara	4	9	51	64
8	PKBM Al Suroya	Metro Timur	4	26	175	205
9	PKBM Permata	Metro Timur	26	86	135	247
Total			461	887	991	2.339

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2025

Berdasarkan tabel 5 di atas terlihat bahwa terdapat 461 siswa yang belajar Paket A (setara SD), 887 siswa Paket B (setara SMP), dan 991 Siswa Paket C (Setara SMA) dengan total siswa 2.339 yang tersebar di 9 Lembaga Pendidikan Non formal se-Kota Metro. Artinya terdapat 2.339 Anak yang bersekolah di satuan Pendidikan non formal.

Kemudian untuk melihat daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di Kota Metro, maka dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah di Kota Metro. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan dan semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Maka dapat dilihat Angka Partisipasi Sekolah Kota Metro sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Metro Tahun 2025

No	Kelompok Umur Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah		
		2023	2024	2025
1	7-12	99,93	99,33	99,51
2	13-15	96,41	96,60	99,76
3	16-18	82,85	82,79	82,00
4	19-24	36,24	36,08	34,96

Sumber: BPS Kota Metro, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa APS Kota Metro jenjang SD terlihat fluktuatif dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan yang terbesar yakni usia 13-15 tahun (SMP) sebesar 99,76 persen diatas usia 7-12 tahun yaitu 99,51 persen dan terus menurun di usia SMA (16-18 tahun) di angka 82,00 persen, dan usia 19-24 tahun

(perguruan tinggi) di angka 24,96 persen. Dari capaian APS di beberapa jenjang pendidikan tersebut terlihat bahwa tidak ada jenjang pendidikan yang APS nya mencapai 100% artinya terdapat Anak atau Penduduk usia sekolah berdasarkan 4 (empat) jenjang tersebut yang tidak mendapatkan akses pendidikan di Kota Metro yang berarti ada kemungkinan anak-anak tersebut tidak bersekolah di Kota Metro atau merupakan termasuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Untuk lebih jelas melihat Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Metro dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 7. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Usia				Total
		< 7	7 -12	13 -15	> 15	
1	Kab. Lampung Selatan	0	966	1,349	4,267	6,582
2	Kab. Lampung Tengah	0	1,437	1,821	7,437	10,695
3	Kab. Lampung Utara	0	682	1,027	2,652	4,361
4	Kab. Lampung Barat	0	194	262	1,659	2,115
5	Kab. Tulang Bawang	0	768	1,304	5,574	7,646
6	Kab. Tanggamus	0	493	739	2,383	3,615
7	Kab. Lampung Timur	0	864	1,28	5,729	7,873
8	Kab. Way Kanan	0	330	486	1,75	2,566
9	Kab. Pesawaran	0	559	780	2,214	3,553
10	Kab. Pringsewu	0	179	228	740	1,147
11	Kab. Mesuji	0	312	461	1,686	2,459
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0	332	526	1,675	2,533
13	Kab. Pesisir Barat	0	225	264	824	1,313
14	Kota Bandar Lampung	0	1,226	1,713	7,037	9,976
15	Kota Metro	0	136	107	283	526

Sumber: Pusdatin Kemendikdasmen, 2025

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Metro berjumlah 136 orang di usia 7-12 tahun (jenjang SD/ sederajat), 107 orang usia 13-15 tahun (jenjang SMP/ sederajat) dan 283 orang usia lebih dari 15 tahun (jenjang SMA/ sederajat) dengan total Anak Tidak Sekolah (ATS) berjumlah 526 orang. Tentunya ini menjadi problem tersendiri Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

4. Kota Metro sebagai kota layak anak

Kota Metro di Lampung memang punya reputasi yang cukup mentereng sebagai Kota Layak Anak (KLA). Bukan sekadar label, ini adalah komitmen jangka panjang untuk memastikan setiap anak di sana tumbuh di lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif. Kota Metro telah berulang kali meraih penghargaan KLA tingkat Nindya. Dalam hierarki KLA (Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA), predikat Nindya menunjukkan bahwa Metro sudah memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak yang sangat kuat dan berkelanjutan. Adapun yang menjadi pilar utama (indikator) penilaian Kota Layak Anak antara lain:

- Hak sipil dan kebebasan: Memastikan semua anak memiliki akta kelahiran (seringkali lewat program jemput bola).
- Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: Adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk edukasi orang tua.

- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan: Penurunan angka *stunting* dan penyediaan Puskesmas Ramah Anak.
- d. Pendidikan dan budaya: Inisiatif Sekolah Ramah Anak (SRA) yang memastikan sekolah bebas dari perundungan (*bullying*).
- e. Perlindungan khusus: Penanganan cepat untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau dalam situasi darurat.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa Kota Metro merupakan Kota Layak Anak sehingga Sekolah di Kota Metro termasuk Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan memastikan Sekolah Bebas dari perundungan serta Sekolah yang inklusif yakni Ramah terhadap Anak – Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Capaian Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Masyarakat Kota Metro

1. Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Metro

Perkembangan Tingkat Kemiskinan merupakan tolak ukur suatu daerah dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan tabel 8 dibawah, Tingkat kemiskinan di Kota Metro menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk miskin turun dari 7,28 persen pada 2023 menjadi 6,44 persen pada 2025, sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 12,80 ribu jiwa pada 2023 menjadi 11,58 ribu jiwa pada 2025. Penurunan ini terjadi meskipun garis kemiskinan terus meningkat dari Rp480.830 pada 2023 menjadi Rp596.139 pada 2025, yang menandakan adanya perbaikan daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tabel 8. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Metro, 2023-2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Garis Kemiskinan (Rp)	480.830	503.161	596.139
2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	12,80	12,07	11,58
3	Persentase Penduduk Miskin	7,28	6,78	6,44
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,12	0,77	0,55
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,24	0,15	0,07

Sumber: BPS Kota Metro, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan signifikan, dari 1,12 dan 0,24 pada 2023 menjadi 0,55 dan 0,07 pada 2025. Hal ini mengindikasikan tidak hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin mengecil. Dengan kata lain, penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan di antara mereka semakin berkurang, mencerminkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kota Metro.

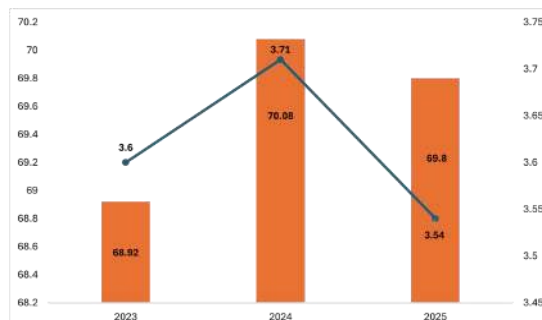
2. Keadaan ketenagakerjaan di Kota Metro

Data ketenagakerjaan Kota Metro tahun 2023–2025, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2025 tercatat sebanyak 135.267 jiwa, dengan angkatan kerja mencapai 94.413 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 40.854 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, 91.074 jiwa bekerja, sedangkan 3.339 jiwa tergolong pengangguran terbuka. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dibanding tahun sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah penduduk usia kerja secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Indikator Ketenagakerjaan Kota Metro, 2023-2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Penduduk usia 15+	131.892	133.547	135.267
2	Angkatan Kerja	90.899	93.584	94.413
3	Bekerja	87.629	90.116	91.074
4	Pengangguran Terbuka	3.270	3.468	3.339
5	Bukan Angkatan Kerja	40.993	39.963	40.854

Sumber: BPS Kota Metro, 2025

**Gambar 3.** TPAK dan TPT Kota Metro, 2023-2025

Sumber: BPS Kota Metro, 2025

Dari sisi indikator utama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun dari 70,08 persen pada 2024 menjadi 69,80 persen pada 2025, menandakan adanya penurunan penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga sedikit menurun dari 3,71 persen menjadi 3,54 persen yang masih berada pada level rendah dan terkendali. Secara umum, kondisi ketenagakerjaan di Kota Metro menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan aktivitas pada sektor bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun dini).

Pemberian Program Kartu Metro Bahagia (KMB) dan PIP (Program Indonesia Pintar)

Pemberian Program Kartu Metro Bahagia (KMB) merupakan strategi Pemerintah Kota Metro dalam rangka pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi serta tidak mendapatkan bantuan pendidikan dari program Indonesia Pintar (PIP). Data Jumlah Peserta Didik penerima Program Kartu Metro Bahagia sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 10. Data Jumlah Peserta Didik Penerima Program Kartu Metro Bahagia (KMB)

No	Jenjang	Jumlah Peserta Didik	
		Tahun 2025	Tahun 2026
1	TK/PAUD	1223	1273
2	SD	500	384
3	SMP	550	360
Total		2273	2017

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta Didik Penerima bantuan Program Kartu Metro Bahagia (KMB) sebanyak 2.273 peserta didik di tahun 2025 dan 2.017 di orang peserta didik di tahun 2026. Setiap peserta didik menerima bantuan

pendidikan sebesar Rp.250.000,-per orang. Dengan bantuan pendidikan ini diharapkan agar peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dapat terbantu dalam membeli perlengkapan sekolah.

Kemudian selain Program Kartu Metro Bahagia (KMB) peserta Didik di Kota Metro juga ada yang menerima bantuan pendidikan dari Program Indonesia Pintar (PIP). Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Data Peserta Didik Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Kota Metro

No	Kecamatan	2025	2026
Jenjang SD			
1	Metro Pusat	108	777
2	Metro Timur	96	1050
3	Metro Selatan	57	537
4	Metro Barat	81	661
5	Metro Utara	104	509
Jenjang SMP			
1	Metro Pusat	188	742
2	Metro Timur	169	631
3	Metro Selatan	68	236
4	Metro Barat	109	414
5	Metro Utara	140	466
Total		1120	6023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2026

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa peserta didik di Kota Metro penerima PIP sebanyak 1.120 orang di tahun 2025 kemudian meningkat di tahun 2026 menjadi 6.023 orang. Peserta Didik SD/ sederajat setiap tahunnya Kelas 1-5 menerima Rp.450.000,-, dan Rp.225.000,-untuk kelas 6. Peserta Didik SMP/ sederajat Kelas 7-8 menerima Rp.750.000,-dan Rp.375.000,-untuk kelas 9. Peserta Didik SMA/ sederajat menerima Rp. Rp.1.800.000,-untuk kelas 10-11, serta Rp.900.000,-untuk kelas 12. Hal tersebut tentunya juga dapat membantu Peserta Didik dari keluarga kurang mampu di Kota Metro untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan seperti buku tulis, tas, dst.

Pembahasan

Pembahasan ini mengintegrasikan temuan analisis masalah dengan kerangka teoritis dan konseptual yang telah ditetapkan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika masalah keadaan ekonomi keluarga yang miskin yang menjadikan Anak Tidak Sekolah.

1. Mengajak Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah melalui teori modal manusia (*human capital theory*).

Teori modal manusia (*human capital theory*) adalah salah satu landasan paling kuat dalam ekonomi pendidikan dan pembangunan sosial (Widiansyah, 2017). Melalui teori ini diharapkan agar Orang Tua dari keluarga Miskin diberikan suatu pemahaman dan pencerahan berpikir bahwa Pendidikan merupakan investasi di masa yang akan datang dalam rangka untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Orang Tua Anak yang Tidak Sekolah (ATS) diberikan sosialisasi dan advokasi bahwa biaya yang dikeluarkan saat ini ketika bersekolah itu akan tergantikan di masa yang akan

datang. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi mendapatkan perlindungan sosial dan bantuan biaya pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah hendaknya terus menggulirkan Program Kartu Metro Bahagia (KMB) dalam rangka membantu biaya Anak-Anak dari keluarga Miskin. Kemudian memastikan bantuan biaya sekolah tersebut tepat sasaran kepada Anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah Pusat dengan memastikan data penerima bantuan pemerintah yang tergabung dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional disingkat DTSEN tepat sasaran. Pemerintah Daerah Kota Metro melalui Dinas Sosial Kota Metro harus terus memvalidasi DTSEN sesuai dengan fakta yang ada. DTSEN ini yang menjadi basis data warga negara Indonesia dari segi ekonomi, dan sosial, yang akurat, komprehensif, dan terpadu untuk efektivitas program pemerintah. Melalui DTSEN yang tepat sasaran, Keluarga Miskin akan mendapatkan hak-haknya melalui bantuan program pengentasan kemiskinan Pemerintah, seperti BPJS Gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Tunai, Bantuan Pangan, dst.

2. Memastikan iklim lingkungan Sekolah yang Ramah Anak (SRA)

Teori ekologi sistem (*ecological systems theory*) menjelaskan bahwa perilaku anak (termasuk putus sekolah) dipengaruhi oleh lingkungan (Dharma, 2022). Anak Tidak mau bersekolah atau putus sekolah dapat disebabkan oleh iklim atau lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak nyaman. Kasus-kasus perundungan (*bullying*) yang sering terjadi dapat mengakibatkan anak keluar dari Sekolah. Kemudian kasus-kasus kenakalan remaja seperti Anak usia sekolah yang hamil diluar pernikahan menjadi problem tersendiri dalam dunia pendidikan. Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak mendapatkan hak-hak nya dalam pendidikan juga dapat menyebabkan Anak Tidak Sekolah. Belum lagi tawuran antar pelajar yang marak terjadi akhir-akhir ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Metro harus dapat memastikan bahwa Kota Layak Anak (KLA) predikat “Nindya” yang disandang oleh Kota Metro harus benar-benar berimplementasi di lingkungan sekolah. Sekolah Ramah Anak (SRA) yang disandang oleh sekolah-sekolah di Kota Metro harus memastikan bahwa tidak ada lagi perundungan (*bullying*), kekerasan, maupun praktek-praktek kenakalan anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tegas dari seluruh *stakeholders* pendidikan yang ada di Kota Metro.

3. Memastikan anak tertarik dan terdorong untuk bersekolah

Teori *push and pull factors* (faktor pendorong dan penarik) menerangkan bahwa ada faktor pendorong (internal) dan faktor penarik (eksternal) yang membuat Anak Tidak Sekolah (Dewa & Prasetyo, 2022). Seorang anak akan menjadi tidak nyaman, dan tidak aman di sekolah, ketika iklim sekolah yang tidak kondusif. Tenaga Pendidik yang tidak dapat membimbing anak secara kurang tepat, kurikulum pendidikan yang kurang baik, serta kasus-kasus perundungan membuat anak terdorong untuk keluar sekolah. Belum lagi dunia luar yang menawarkan godaan pekerjaan yang mendapatkan uang membuat anak tertarik untuk keluar sekolah. Hal hal semacam ini harus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan *stakeholders* yang ada. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro harus terus melakukan pengawasan kepada sekolah. Memastikan bahwa kebijakan -kebijakan sekolah, kurikulum sekolah, pelajaran sekolah berjalan sesuai dengan rambu-rambu pendidikan yang telah ditetapkan, serta tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dipastikan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas mengajar dan membimbing siswa dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan

serta peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik harus dilaksanakan melalui program kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan.

4. Kesenjangan implementasi kebijakan dan kelemahan tata kelola pendidikan Kota Metro.

Tak dapat dipungkiri, bahwa implementasi kebijakan bidang pendidikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro tentunya memiliki kelemahan. Belum menyeluruhnya penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Metro terkadang menjadi suatu problem ketika terjadi kasus -kasus perundungan (*bullying*) yang terjadi di sekolah. Belum lagi, penyaluran bantuan-bantuan melalui program pemerintah untuk keluarga miskin terkadang tidak tepat sasaran. Belum maksimalnya tata kelola pendidikan Kesetaraan di Kota Metro menjadikan anak-anak tidak sekolah enggan untuk bersekolah di Sekolah non-Formal Kesetaraan. Kerjasama Pemerintah kepada Pihak Swasta di Kota Metro melalui program CSR belum maksimal. Mensikapi itu semua, Pemerintah Kota Metro hendaknya memperkuat kebijakan berupa regulasi yang terintegrasi dan komprehensif dalam sektor pendidikan yang melibatkan semua *stakeholders* (pentahelix) di Kota Metro. Kebijakan Pendidikan khususnya dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) memerlukan kebijakan yang tidak parsial tetapi kebijakan yang bersifat stimultan.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ini secara kritis mengkaji kerangka kebijakan dan peraturan yang relevan dalam upaya penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan celah dalam mengatasi masalah.

1. Kebijakan Tingkat Nasional:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan pemerintah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal 12 tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 6 menegaskan kewajiban warga negara usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, sementara Pasal 12 memberikan hak kepada peserta didik untuk mendapatkan beasiswa bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan.
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan secara terpadu, serta mengharuskan integrasi program antar sektor dalam perencanaan daerah. Dalam konteks ATS, Undang-Undang ini mengharuskan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Integrasi Dokumen Perencanaan dalam penanganan ATS harus masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Kepala Daerah dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor agar masalah pendidikan tidak hanya menjadi beban Dinas Pendidikan, tetapi juga didukung oleh sektor sosial, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian Undang-Undang ini menjamin agar setiap program pembangunan, termasuk penanganan Anak Tidak Sekolah berjalan secara efektif dan efisien dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan partisipasi masyarakat.

- c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Prioritas Pelayanan bagi masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan, terutama akibat kemiskinan. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang atau keluarga agar kelangsungan hidupnya terpenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Kemudian dalam Aksesibilitas Layanan Dasar, penanganan keluarga rentan melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk nyata perlindungan sosial yang mencakup akses kesehatan dan pendidikan. Menindaklanjuti undang-undang ini, Pemerintah menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan mandat yang lebih spesifik mengenai hak-hak fakir miskin terhadap layanan dasar. Pendidikan sebagai Kebutuhan Dasar mencakup pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Fakir miskin berhak mendapatkan pendidikan. Pemenuhan hak ini merupakan cara utama untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kepala Daerah wajib mengkoordinasikan penanganan fakir miskin di wilayahnya masing-masing secara terintegrasi. Adapun relevansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ini terkait Penanganan Anak Tidak Sekolah yakni memberikan landasan bagi pemberian bantuan sosial pendidikan bagi keluarga rentan guna menekan angka putus sekolah akibat kemiskinan. Mensikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Metro mulai tahun 2021, telah memberikan bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Metro Ceria yang ditahun 2025 diakuisisi menjadi Kartu Metro Bahagia. Adapun program ini merupakan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp.250.000,-kepada siswa sekolah yang berasal dari keluarga rentan dan tidak mampu secara ekonomi dan tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah yakni bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP).
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan regulasi krusial yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan dasar bagi seluruh warga negara. Dalam bidang pendidikan, SPM mencakup jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diberikan kepada anak usia sekolah (7-18 tahun). Pemerintah Kota Metro harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib. Peraturan Pemerintah ini mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan Pelayanan Dasar pendidikan dengan mutu tertentu. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Mutu pelayanan harus memenuhi standar teknis agar setiap warga negara dapat hidup layak. Kegagalan dalam memenuhi standar ini merupakan pelanggaran terhadap hak dasar warga negara untuk hidup layak melalui Pendidikan. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah terus didorong untuk mencapai target-target pelayanan minimal yang dituangkan dalam indikator-indikator SPM bidang pendidikan antara lain pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS), Peningkatan proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B, pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV, serta keamanan

kebinekaan dan inklusivitas .

- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 menandai pergeseran fokus nasional dari sekadar akses pendidikan menuju transformasi kualitas dan ketuntasan Wajib Belajar 12 Tahun. Dokumen ini menempatkan penanganan ATS sebagai salah satu "Kegiatan Prioritas Utama" (Poin 37) yang harus diakselerasi oleh pemerintah pusat dan daerah. RPJMN 2025-2029 menekankan strategi peningkatan kualitas Modal Manusia melalui pemenuhan layanan dasar dengan pendekatan siklus hidup. Salah satu inisiatif strategis yang diperkenalkan adalah "Sekolah Rakyat", sebuah proyek strategis nasional yang bertujuan menyediakan layanan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang selama ini terpinggirkan dari sistem formal. Penanganan ATS dalam RPJMN ini juga didorong melalui transformasi digital layanan publik guna memastikan data anak yang putus sekolah teridentifikasi secara tepat sasaran (*by name by address*).

2. Kebijakan Tingkat Daerah:

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2025-2029, Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) memiliki relevansi yang sangat kuat dalam dokumen RPJMD Kota Metro 2025-2029, khususnya sebagai bagian dari upaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan inklusif. Penanganan ATS merupakan implementasi langsung dari Misi 1 Kota Metro, yaitu: "*Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif, dan Berkarakter*". Misi ini memprioritaskan sektor pendidikan sebagai fondasi utama Pembangunan. Kota Metro memposisikan diri sebagai Kota Inklusif, yang dibuktikan dengan adanya 38 unit sekolah inklusif, Pusat Layanan Autis (PLA), serta berbagai jenjang pendidikan dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. Penanganan ATS relevan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan inklusif ini benar-benar menjangkau seluruh lapisan anak usia sekolah tanpa terkecuali.

Limitasi Kajian

Setiap kajian ilmiah memiliki batasan yang perlu diakui secara transparan untuk memberikan gambaran yang jujur tentang ruang lingkup dan generalisasi temuan. Naskah kebijakan ini, meskipun komprehensif, juga tidak luput dari beberapa limitasi.

1. Fokus Spesifik pada Pemerintah Kota Metro: Kajian ini secara eksklusif berfokus pada konteks Pemerintah Kota Metro. Meskipun analisis mendalam terhadap kasus spesifik ini menghasilkan wawasan yang berharga, temuan dan rekomendasi mungkin tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke semua Anak Tidak Sekolah di Kota Metro. Kekuatan dari studi kasus adalah pemahaman mendalam tentang konteks spesifik. Namun, kedalaman ini seringkali mengorbankan generalisasi yang luas.
2. Ketergantungan pada Data Sekunder: Analisis dalam kajian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder, termasuk dokumen kebijakan yang ada, literatur akademik, dan laporan institusional. Tidak ada pengumpulan data primer yang dilakukan, seperti survei lapangan mendalam, wawancara ekstensif atau observasi langsung. Meskipun data sekunder menyediakan fondasi yang kuat untuk analisis kebijakan dan aplikasi teoritis, ketergantungan ini berarti kajian mungkin tidak sepenuhnya menangkap semua permasalahan yang ada. Kajian ini memberikan analisis tingkat kebijakan yang kuat, namun penelitian di masa depan dapat melengkapi temuan ini dengan data empiris primer untuk memvalidasi asumsi

tentang pendorong perilaku dan tantangan implementasi dari perspektif audiens target.

3. Konseptual Sifat "Kerangka Pikir". Materi inti yang menjadi dasar pengembangan laporan ini adalah sebuah "Kerangka Pikir" (*conceptual framework*), yang pada dasarnya merupakan garis besar awal ide dan masalah. Meskipun komprehensif dalam cakupan konseptualnya, "kerangka pikir" ini mungkin tidak mengandung detail empiris granular yang akan dihasilkan oleh proyek penelitian yang sepenuhnya dieksekusi. Tugas dalam pengembangan laporan ini adalah untuk mengembangkan kerangka konseptual ini menjadi artikel yang utuh. Ini berarti memperluas ide-ide awal dengan kedalaman teoritis dan ketelitian analitis. Batasannya adalah bahwa "kerangka pikir" asli mungkin tidak sepenuhnya mengantisipasi semua kompleksitas yang terungkap selama pengembangan. Oleh karena itu, laporan ini berfungsi sebagai fondasi yang kuat, tetapi asal "konseptual" berarti beberapa titik data spesifik atau studi kasus detail mungkin disimpulkan atau dibahas secara luas daripada dibuktikan secara empiris mendalam dalam cakupan ini.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian dalam dokumen ini memiliki beberapa aspek kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari analisis pendidikan pada umumnya, khususnya dalam konteks tata kelola daerah di Kota Metro. Berikut adalah poin-poin kebaruannya:

1. Pendekatan analisis multidimensional dan terstruktur kebaruan kajian ini terletak pada penggunaan metode analisis yang sangat sistematis untuk membedah masalah sosial. Penulis tidak hanya memaparkan data secara deskriptif, tetapi menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk memprioritaskan masalah dan Diagram *Fishbone* untuk memetakan akar penyebab secara mendalam dari empat kategori utama: SDM (*Man*), Struktur Ekonomi (*Milieu*), Finansial (*Money*), serta Akses dan Informasi (*Opportunity*). Pendekatan ini memberikan struktur ilmiah yang kuat dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.
2. Pengungkapan Anomali "Kota Pendidikan vs Realitas Sosial". Kajian ini menyajikan kebaruan data berupa anomali statistik yang tajam di Kota Metro. Di satu sisi, daerah ini memiliki IPM kategori "Sangat Tinggi" (81,22) dan menyandang reputasi sebagai "Kota Pendidikan". Namun di sisi lain, kajian ini mengungkap fakta ironis bahwa terdapat 526 Anak Tidak Sekolah (ATS) dan hanya sekitar 13,05% warga yang menuntaskan pendidikan jenjang S1. Penekanan pada kesenjangan antara predikat daerah dengan realitas lapangan ini memberikan perspektif baru bagi pengambil kebijakan lokal.
3. Integrasi Teori Ekonomi dan Ekologi dalam Isu ATS Secara teoritis, kajian ini membawa kebaruan dengan menggabungkan Teori Modal Manusia (*Human Capital*), Teori Ekologi Sistem, dan Teori *Push and Pull Factors* untuk menganalisis satu fenomena yang sama. Integrasi ini memungkinkan pemahaman bahwa keputusan anak untuk tidak sekolah bukan hanya masalah ekonomi pribadi, tetapi hasil dari interaksi kompleks antara beban finansial keluarga (*opportunity cost*), iklim sekolah yang tidak kondusif (seperti perundungan), dan struktur pasar kerja informal di daerah tersebut.
4. Rekomendasi Kebijakan yang Spesifik dan Terintegrasi (Pentahelix). Kebaruan lainnya adalah tawaran solusi yang tidak lagi bersifat parsial atau hanya membebaskan masalah pada Dinas Pendidikan. Kajian ini mendorong model

penanganan berbasis Pentahelix dan integrasi data melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) agar bantuan seperti Kartu Metro Bahagia benar-benar tepat sasaran. Hal ini mencakup transformasi peran pemerintah daerah dari sekadar penyedia fasilitas menjadi koordinator lintas sektor yang memastikan keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Bagian ini menyajikan dan mengevaluasi alternatif kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi masalah Keadaan Ekonomi Orang Tua yang Miskin memaksa Anak Tidak Sekolah. Evaluasi ini akan mengarah pada pemilihan opsi yang paling direkomendasikan berdasarkan proses skoring sistematis.

Berdasarkan analisis akar masalah yang telah dilakukan dan dukungan dari kerangka teoritis, tiga alternatif kebijakan strategis diusulkan bagi Pemerintah Kota Metro. Alternatif-alternatif ini bersifat regulatori, bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk tindakan. Berdasarkan analisis akar masalah dan dukungan teori, berikut adalah tiga alternatif kebijakan utama yang telah dipertimbangkan untuk mengatasi masalah.

Identifikasi Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan 1: Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola Pendidikan Kesetaraan.

Alternatif solusi kebijakan ini berakar kuat pada pemahaman bahwa bagi anak yang sudah terlanjur putus sekolah cukup lama atau sudah bekerja, jalur formal seringkali tidak lagi relevan. Oleh karena itu Revitalisasi Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) dengan kurikulum yang lebih fleksibel. Kebijakan ini adalah sebuah strategi mendasar untuk mengatasi akar masalah Keadaan Orang Tua yang miskin yang memaksa Anak Tidak Sekolah karena harus bekerja membantu ekonomi orang tua dan keluarga, tetapi dengan adanya Pendidikan Kesetaraan ini. Anak-Anak usia sekolah mendapatkan hak-hak belajar dan memperoleh pendidikan sembari bekerja. Mendasari pendekatan ini adalah Teori *Push and Pull Factors* (Faktor Pendorong dan Penarik, yang mana Anak-Anak dapat ditarik kembali untuk kembali ke sekolah Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, atau C.

Alternatif Kebijakan 2: Integrasi Komprehensif Pendidikan dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Kebijakan ini mengintegrasikan program kegiatan Pemerintah Daerah Kota Metro secara menyeluruh sektor pendidikan terutama untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah. Alternatif solusi ini langsung menyasar akar masalah Kemiskinan yang merupakan alasan utama Anak Tidak Sekolah. Kebijakan ini bertujuan menghilangkan hambatan biaya langsung dan biaya peluang. Sinkronisasi data antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) agar bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) maupun Kartu Metro Bahagia (KMB) otomatis mengalir begitu seorang anak terdeteksi putus sekolah karena Orang Tua yang tidak

Mampu secara ekonomi. Alternatif ini ini menjawab terhadap akar permasalahan terkait Pendapatan Orang Tua yang dibawah garis kemiskinan. Infrastruktur Pendidikan, Aksesibilitas Pendidikan maupun Iklim Pendidikan juga ditingkatkan. Sekolah Ramah Anak (SRA) ditingkatkan diseluruh sekolah yang ada. Sekolah Inklusi juga diharapkan diwujudkan.

Kemudian mengacu pada Teori Ekologi Sistem (*Ecological Systems Theory*). (Urie Bronfenbrenner) ini menjelaskan bahwa perilaku anak (termasuk putus sekolah) dipengaruhi oleh lingkungan yang berlapis seperti keadaan ekonomi keluarga, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah . Sedangkan konsep Transformasi Kualitas dan Ketuntasan Wajib Belajar 12 Tahun yang tertuang dalam strategi nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 harus diwujudkan. Oleh karena itu dengan optimalisasi Komitmen Pemerintah Daerah Kota Metro pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan serta Penanganan Anak Tidak Sekolah harus dilaksanakan serta persoalan-persoalan klasik tersebut dapat teratasi dengan baik. Pemerintah Daerah diharapkan juga membentuk Tim Terpadu Penanganan Anak Tidak Sekolah (Timdu ATS) yang melibatkan semua *Stakeholders* Lintas Sektor yakni Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, serta Pihak Swasta yang bertugas melakukan pendataan ATS serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk kembali menyekolahkan kembali anak-anaknya yang Tidak Sekolah serta melakukan langkah - langkah kongkret berupa solusi permasalahan ekonomi, sosial yang dihadapi oleh Anak-Anak Tidak Sekolah tersebut.

Alternatif Kebijakan 3: Kebijakan Pengembangan Kemitraan Strategis Pendidikan dengan seluruh *stakeholders*

Alternatif solusi kebijakan ini berfokus pada penguatan eksternal yang esensial untuk mempercepat implementasi penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro. Hal ini untuk menjawab akar masalah terkait Beban Keluarga Yang Besar sedangkan penghasilan orang tua kecil Di sinilah Pengembangan Kemitraan Strategis dengan seluruh *stakeholders* berperan terutama kepada pihak-pihak swasta maupun sektor sektor informal untuk dapat memberikan upah yang layak terhadap masyarakat yang tidak memiliki keahlian tersebut.

Mengacu pada konsep Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) (Gary Becker dan Theodore Schultz), bahwa pendidikan merupakan investasi yang sangat besar dalam membangun masa ekonomi di masa depan, maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal, seperti akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan sektor swasta dalam mengkampanyekan anak-anak untuk bersekolah serta kembali ke sekolah (bagi yang drop out atau Tidak melanjutkan Sekolahnya kembali).

Pemerintah Daerah Kota Metro sebagai institusi Pemerintah Daerah dan agen perubahan, tidak dapat bergerak sendiri dalam upaya keberlanjutan. Membangun dan menjaga kemitraan yang kuat adalah kunci untuk membuka akses terhadap sumber daya tambahan, serta memperluas dampak program Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan targetnya dalam perencanaan pembangunan yang ada. Kolaborasi dengan Pihak Swasta, misalnya, himbuan untuk tidak memperkerjakan anak-anak yang masih sekolah, atau mendapatkan dukungan dari Akademisi dalam mengajak masyarakat untuk memasukan anak-anaknya ke sekolah. Pengembangan kemitraan ini relevan dengan isu prioritas Pembangunan Modal Manusia yang telah ada dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kota Metro.

Analisis dan Evaluasi Alternatif Kebijakan

Bagian ini menganalisis dan mengevaluasi setiap alternatif kebijakan yang telah diidentifikasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan yaitu efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang. Penilaian dilakukan dengan skoring 1-5 untuk setiap kriteria (5 = Sangat Tinggi, 1 = Sangat Buruk). Metodologi penilaian ini mengacu pada kerangka analisis kebijakan Dunn (1999). Untuk memastikan satu rekomendasi kebijakan prioritas, kami melakukan peninjauan ulang skoring dengan pertimbangan yang lebih mendalam pada setiap kriteria. Kebijakan yang menghasilkan total skor tertinggi dan paling prioritas akan menjadi rekomendasi utama.

Tabel 12. Kerangka Analisis Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Ekuitas	Responsivitas	Total
1	Alternatif 1; Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola Pendidikan Kesetaraan Efektivitas: Tinggi karena langsung mengatasi akar masalah Anak Yang Tidak Sekolah karena harus bekerja membantu orang tua sehingga anak-anak tersebut dapat bersekolah kembali. Efisiensi: Cukup efisien dalam jangka panjang, namun memerlukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat. Ekuitas: Tinggi karena kebijakan ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Responsivitas: Tinggi karena merespons kebutuhan solusi yang dihadapi oleh anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah	4	3	4	4	15
2	Alternatif 2: Integrasi Komprehensif Pendidikan dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Efektivitas: Sangat tinggi karena langsung mengatasi akar masalah yang kemiskinan dan ekonomi orang tua yang tidak dapat mensekolahkan anak-anaknya. Efisiensi: efisien, karena mengintegrasikan program kegiatan	5	4	5	5	19

	Pemerintah Daerah ke dalam aspek pendidikan. Ekuitas: Sangat tinggi, karena menjangkau seluruh masyarakat Responsivitas: Sangat tinggi, karena menjawab kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan kesadaran, masyarakat akan pentingnya pendidikan.					
3	Alternatif 3: Pengembangan Kemitraan Strategis dengan seluruh <i>stakeholders pentahelix</i> Efektivitas: Sangat Tinggi, karena memperluas jangkauan dan sumber daya, mengatasi keterbatasan anggaran dan SDM internal. Efisiensi: efisien, karena memungkinkan Pemda Metro memanfaatkan sumber daya eksternal, mengurangi beban finansial Pemda. Ekuitas: Cukup tinggi, manfaat tersebar luas, namun mungkin ada fokus pada area tertentu tergantung kemitraan. Responsivitas: Tinggi, karena responsif terhadap peluang kolaborasi dengan <i>stakeholders</i> .	5	4	3	4	16

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis dan skoring ulang dengan penajaman kriteria Dunn (1999), Alternatif 2: Integrasi Komprehensif Pendidikan dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro mendapatkan total skor tertinggi (19/20). Hal ini menunjukkan bahwa Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Metro harus dilakukan secara terintegrasi, komprehensif terhadap seluruh *stakeholders* yang ada di Kota Metro.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Metro merupakan fenomena multidimensional yang berakar utama pada hambatan ekonomi keluarga. Meskipun Kota Metro memiliki predikat sebagai "Kota Pendidikan" dengan IPM kategori "Sangat Tinggi", terdapat anomali berupa ratusan anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan formal, terutama pada kelompok usia di atas 15 tahun. Analisis prioritas menunjukkan bahwa kemiskinan struktural menjadi determinan paling krusial yang menciptakan "biaya peluang", sehingga memaksa anak masuk ke pasar kerja informal lebih awal demi membantu ekonomi keluarga.

Selain faktor ekonomi, tantangan sistemik lainnya meliputi tingginya angka pernikahan dini yang memicu *drop out*, terbatasnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta iklim sekolah yang belum sepenuhnya aman dari praktik perundungan (*bullying*). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan ATS tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kebijakan yang bersifat simultan dan terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor (*pentahelix*).

Implikasi signifikan dari kajian ini menegaskan perlunya penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran melalui validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan biaya pendidikan, seperti Kartu Metro Bahagia, menjangkau

keluarga yang paling rentan. Keberhasilan penanganan ATS di Kota Metro sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program penanganan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) serta menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar ramah anak dan inklusif.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, direkomendasikan kepada Wali Kota Metro untuk melakukan kebijakan yang strategis dan konkret melalui penerbitan regulasi yang mengatur dan mengikat seluruh *stakeholders* sehingga Pendidikan di Kota Metro dapat terintegrasi serta terlaksana secara komprehensif untuk mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Metro melalui “Penerbitan Peraturan Walikota Metro tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Metro”.

Substansi Peraturan Walikota Metro antara lain:

1. Perlindungan sosial: Penguatan bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Metro Bahagia (KMB) bagi keluarga rentan yang tidak ter-cover bantuan nasional (PIP). KMB dirancang sebagai instrumen bantuan sosial pendidikan untuk menghilangkan hambatan finansial. RADPATS mengamanatkan Komitmen dan Besaran Pemberian bantuan tunai sebesar Rp 250.000 per penerima untuk tahun anggaran 2025. Orang tua/wali wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan menerima bantuan dan keabsahan dokumen guna menjamin akuntabilitas serta memprioritaskan anak dari keluarga miskin dan rentan, terutama pada jenjang PAUD yang belum terakomodasi sepenuhnya oleh Program Indonesia Pintar (PIP) nasional.
2. Penguatan ekonomi keluarga: Melalui kemudahan keluarga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan modal usaha mikro kecil (UMK), pemberian pelatihan keterampilan kerja, serta bantuan berobat kita sakit (BPJS Kesehatan). Ketika ekonomi keluarga diperkuat, orang tua tidak lagi dihadapkan pada pilihan antara "makan hari ini" atau "sekolah untuk masa depan". Penguatan ekonomi menurunkan nilai Biaya Peluang (*Opportunity Cost*) anak, sehingga anak tidak ditarik dari sekolah untuk bekerja (buruh dll.).
3. Penguatan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C): RADPATS menempatkan pendidikan non-formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai solusi utama bagi anak yang terlanjur bekerja atau berada di atas usia sekolah reguler. Strategi penguatan meliputi pemberian layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal dengan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual. Fleksibilitas Pembelajaran melalui implementasi model *blended learning* (kolaborasi tatap muka dan online) dan jadwal belajar yang luwes (misalnya 3 kali seminggu) untuk mengakomodasi anak yang harus bekerja membantu ekonomi keluarga. Menambahkan materi kecakapan hidup (*life skills*) dan kewirausahaan, seperti menjahit, tata boga, atau multimedia, sehingga lulusan Paket C memiliki daya saing di pasar kerja serta menjamin bahwa ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kekuatan hukum dan hak akses yang setara dengan ijazah pendidikan formal untuk melanjutkan studi atau mencari pekerjaan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan: Pemerintah Kota Metro harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib. Pemerintah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan Pelayanan Dasar pendidikan dengan mutu tertentu. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan

kabupaten/kota mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

5. Integrasi dan sinkronisasi data lintas sistem: RADPATS mewajibkan penggunaan data tunggal yang valid untuk intervensi yang tepat sasaran. Sinkronisasi antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dengan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui database Dukcapil. Pemanfaatan sistem otomatisasi untuk mendeteksi anak dari keluarga desil 1-4 (miskin hingga rentan) agar otomatis masuk dalam antrian bantuan pendidikan. Penggunaan aplikasi Verval ATS untuk mengidentifikasi status anak secara detail, baik kategori *Drop Out* (DO) maupun Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).
6. Kelembagaan Tim Terpadu (Timdu ATS): Penguatan struktur Timdu ATS dari tingkat Kota hingga Kelurahan dengan mandat melakukan pendataan berkala menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dan melakukan kunjungan lapangan (*rekonfirmasi*) untuk memotivasi anak kembali sekolah. ATS bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan semata, melainkan kinerja kolektif. Misalnya, keberhasilan Dinas Sosial dalam menurunkan angka kemiskinan atau keberhasilan Dinas PPPA dalam menurunkan angka pernikahan dini harus dikaitkan langsung dengan dampaknya terhadap penurunan angka ATS.
7. Transformasi lingkungan sekolah menjadi Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Inklusif (SRA dan Inklusi): Amanat untuk mewujudkan satuan pendidikan yang inklusif dan ramah anak dengan standar Bersih, Aman, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Asri, dan Nyaman. Sekolah diwajibkan menerapkan disiplin positif tanpa kekerasan dan mengalokasikan kuota afirmasi bagi warga miskin sekurang-kurangnya 20% dari daya tampung. Dengan implementasi amanat RAD ATS yang terintegrasi ini, Kota Metro berkomitmen untuk memastikan "tidak ada anak yang tertinggal" (*no child left behind*), guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memutus rantai kemiskinan menuju Indonesia Emas 2045.
8. Kolaborasi lintas sektor (*pentahelix*): Sinergi kebijakan ini juga membuka ruang bagi partisipasi sektor swasta dan masyarakat melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendanaan penanganan ATS tidak boleh hanya bertumpu pada APBD yang terbatas, melainkan harus dikolaborasikan dengan potensi sumber daya non-pemerintah untuk mendanai program beasiswa khusus atau penyediaan alat bantu bagi siswa disabilitas. Kolaborasi ini memastikan bahwa tanggung jawab menuntaskan ATS menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh elemen kota.

REFERENSI

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Bappeda, M. (2025). *RPJMD Kota Metro 2025-2029*. Bappeda Kota Metro.
- Becker, G. S. (1975). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (2nd ed.)*. Columbia University Press for NBER.
- BPS Kota Metro. (2025). *Statistik Daerah Kota Metro 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Metro.
<https://metrokota.bps.go.id/id/publication/2025/12/31/oeca669be3db57d7cd018327/regional-statistics-of-metro-municipality-2025.html>

- Breman, J. (2022). *Capitalism, Inequality and Labour in India*. Cambridge University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*. (Original work published PT Serambi Ilmu Semesta)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewa, Y. Y. N., & Prasetyo, A. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun (SMASederajat) Di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 175–184. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1250>
- Dharma, D. S. A. (2022). Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif di Sekolah. *Special and Inclusive Education Journal*, 3(2), 115–123. <https://doi.org/10.36456/special.vol3.no2.a6642>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (2025). *Profil Pendidikan Kota Metro*. Pemerintah Kota Metro.
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Kedua). Gajah Mada University Press.
- Firdausy, C. M. (2020). *Kebijakan Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor.
- Hallahan, D. P., & Kauffman, J. M. (2006). *Exceptional Learners: Introduction to Special Education* (10th ed).
- Hikamudin, E., Wahid, R., & Bisri, H. (2023). Analisis Kondisi Status Sosial Ekonomi Keluarga Dalam Menunjang Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak. 7 (1), 79–87.
- Huraerah, A. (2006). *Huraerah, A. (2006). Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendikia.
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan* (Istiwidayanti & Soedjarwo, Trans.; 5th ed.). Erlangga.
- James, A., & Prout, A. (1997). *Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood* (2nd ed.). Falmer Press.
- Juliansyah, J., Khoffifah, K., Khoiriyah, K., & Daryono, D. (2024). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2642–2654.
- Kemendikdasmen. (2025). *Rapor Pendidikan Indonesia*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Portal Data Kemendikdasmen. <https://data.kemendikdasmen.go.id/publikasi/p/rapor-pendidikan-indonesia/rapor-pendidikan-indonesia-2025-indonesia-3>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, P. D. dan T. I. (2025). *Verval ATS* [Dataset]. <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id>

- Kementerian PPPA. (2024). *Profil Anak Indonesia Tahun 2024*. Kementerian PPPA. <https://www.kemenpppa.go.id/buku/profil-anak-indonesia-tahun-2024>
- Kurt, I. (2015). Education and Social Reproduction in Schools. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 5(1), 223. <https://doi.org/10.26417/ejser.v5i1.p223-226>
- Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. (2013). *Karya Ki Hadjar Dewantara, bagian pertama: Pendidikan* (5 ed.). Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Mubyarto. (1995). *Pengantar Ekonomi Pertanian (Edisi ke-4)*. LP3ES.
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi sumber daya manusia: Dalam perspektif pembangunan* (1 ed.). RajaGrafindo Persada.
- Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). *The psychology of the child* (H. Weaver, Trans.). Basic Book.
- Pohan, N. H. (2017). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435.
- Purnomo, D. (2014). *Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*.
- Sasono, A. (1982). *Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Lembaga Studi Pembangunan.
- Sulianta, F. (2024). *Diagram Fishbone untuk Berbagai Kebutuhan*.
- Suroto. (2000). *Strategi pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Gajah Mada University Press.
- Todaro, M., & Smith, S. (2020). *Economic Development*. Pearson.
- United Nations. (1989). *United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations Treaty Series, 1577, 3*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 17(2), 207–215. <https://doi.org/10.31294/jc.v17i2.2612>
- Wijaya, H. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 9(1), 48–55.